

**MATRIKS HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016
UNTUK DITINDAKLANJUTI DI TAHUN 2017**

TIM POKJA		LANGKAH-LANGKAH	RENCANA AKSI
BIDANG PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	1	MENINDAKLANJUTI PERMENDAGRI 88 TAHUN 2013	<ul style="list-style-type: none"> • SETIAP KEGIATAN/AKTIFITAS HARUS DIDUKUNG DENGAN BUKTI/DOKUMEN TERTULIS.
		* PENYUSUNAN SOP PENYUSUNAN PRODUK HUKUM;	
		* PENYUSUNAN SOP SISTEM PENGENDALIAN PRODUK HUKUM	
		* PENYUSUNAN SOP EVALUASI PRODUK HUKUM	
	2	MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP PRODUK HUKUM YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG LEBIH TINGGI, MENGHAMBAT PERIJINAN, TIDAK SESUAI BUDAYA	

**MATRIKS HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016
UNTUK DITINDAKLANJUTI DI TAHUN 2017**

TIM POKJA		LANGKAH-LANGKAH	RENCANA AKSI
BIDANG PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	1	MELAKUKAN ASESSMENT KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI	<ul style="list-style-type: none"> • SETIAP KEGIATAN/AKTIFITAS HARUS DIDUKUNG DENGAN BUKTI/DOKUMEN TERTULIS.
	2	MELAKUKAN ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI KEMENDAGRI;	
	3	MENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI DENGAN DUKUNGAN ANGGARAN YANG MENCUKUPI;	
	4	MELAKUKAN PENGEMBANGAN BERBASIS KOMPETENSI PADA PEGAWAI SESUAI DENGAN RENCANA DAN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI	
	5	MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU YANG TERKAIT DENGAN KINERJA ORGANISASI	
	6	MENYUSUN STANDAR KINERJA YANG SESUAI DENGAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DIATASNYA	
	7	KONSEP SIKERJA UNTUK DISESUIKAN DENGAN PERJANJIAN KINERJA (PK) DAN BERBASIS OUTPUT;	



LANJUTAN

TIM POKJA		LANGKAH-LANGKAH	RENCANA AKSI
BIDANG PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	8	MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU SETIAP BULAN DAN TRIWULAN	<ul style="list-style-type: none">• SETIAP KEGIATAN/AKTIFITAS HARUS DIDUKUNG DENGAN BUKTI/DOKUMEN TERTULIS.• KEGIATAN SOSIALISASI HARUS DILENGKAPI DENGAN BUKTI EVALUASI TENTANG TINGKAT PEMAHAMAN PESERTA SOSIALISASI TERHADAP MATERI SOSIALISASI
	9	MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA INDIVIDU	
	10	MENETAPKAN HASIL PENILAIAN KINERJA INDIVIDU SEBAGAI SALAH SATU DASAR PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI	
	11	MENETAPKAN HASIL CAPAIAN KINERJA INDIVIDU SEBAGAI DASAR UNTUK PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA	
	12	MELAKUKAN PEMBERIAN SANKSI DAN IMBALAN (<i>REWARD</i>) KEPADA SELURUH PEGAWAI YANG MEMENUHI SYARAT;	
	13	MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN SECARA TERUS MENERUS PADA SELURUH UNIT ORGANISASI	

**MATRIKS HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016
UNTUK DITINDAKLANJUTI DI TAHUN 2017**

TIM POKJA		LANGKAH-LANGKAH	RENCANA AKSI
BIDANG PENGUATAN PENGAWASAN	1	MELAKUKAN PENILAIAN RISIKO KEPADA SELURUH KOMPONEN DAN UNIT ORGANISASI KEMENDAGRI	<ul style="list-style-type: none"> • SETIAP KEGIATAN/AKTIFITAS HARUS DIDUKUNG DENGAN BUKTI/DOKUMEN TERTULIS. • KEGIATAN SOSIALISASI HARUS DILENGKAPI DENGAN BUKTI EVALUASI TENTANG TINGKAT PEMAHAMAN PESERTA SOSIALISASI TERHADAP MATERI SOSIALISASI
	2	MELAKUKAN KEGIATAN PENGENDALIAN UNTUK MEMINIMALISIR RISIKO YANG TELAH DIIDENTIFIKASI PADA SELURUH KOMPONEN DAN UNIT ORGANISASI KEMENDAGRI	
	3	MELAKUKAN SOSIALISASI SPI KEPADA SELURUH PIHAK TERKAIT	
	4	MENYUSUN SOP PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	
	5	MENINDAKLANJUTI PENGADUAN MASYARAKAT SESUAI DENGAN SOP	
	6	MELAKUKAN PENGUKURAN/SURVEI TERHADAP KUALITAS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	
	7	MELAKUKAN SOSIALISASI <i>WHISTLE BLOWING SYSTEM</i> KEPADA SELURUH PIHAK TERKAIT	
	8	MENINDAKLANJUTI ATAS HASIL EVALUASI <i>WHISTLE BLOWING SYSTEM</i>	

LANJUTAN

TIM POKJA		LANGKAH-LANGKAH	RENCANA AKSI
BIDANG PENGUATAN PENGAWASAN	9	MELAKUKAN SOSIALISASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN KEPADA PEGAWAI/UNIT ORGANISASI	<ul style="list-style-type: none">• SETIAP KEGIATAN/AKTIFITAS HARUS DIDUKUNG DENGAN BUKTI/DOKUMEN TERTULIS.• KEGIATAN SOSIALISASI HARUS DILENGKAPI DENGAN BUKTI EVALUASI TENTANG TINGKAT PEMAHAMAN PESERTA SOSIALISASI TERHADAP MATERI SOSIALISASI
	10	MELAKUKAN MONITORING SECARA BERKALA ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
	11	MELAKUKAN EVALUASI ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
	12	MELAKUKAN TINDAKLANJUT ATAS HASIL EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
	13	MELAKUKAN PENGUSULAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI	
	14	MELAKUKAN MONITORING SECARA BERKALA ATAS PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS DI KOMPONEN/UNIT ORGANISASI TERPILIH/DITENTUKAN	
	15	MELAKUKAN EVALUASI ATAS PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS	
	16	MELAKUKAN SOSIALISASI PREDIKAT WBK/WBBM KEPADA PIHAK TERKAIT	

LANJUTAN

TIM POKJA		LANGKAH-LANGKAH	RENCANA AKSI
BIDANG PENGUATAN PENGAWASAN	17	MELAKUKAN PENETAPAN UNIT KERJA DENGAN PREDIKAT WBK/WBBM	<ul style="list-style-type: none">• SETIAP KEGIATAN/AKTIFITAS HARUS DIDUKUNG DENGAN BUKTI/DOKUMEN TERTULIS.• KEGIATAN SOSIALISASI HARUS DILENGKAPI DENGAN BUKTI EVALUASI TENTANG TINGKAT PEMAHAMAN PESERTA SOSIALISASI TERHADAP MATERI SOSIALISASI
	18	MELAKUKAN MONITORING SECARA BERKALA ATAS PELAKSANAAN WBK/WBBM DI KOMPONEN/ UNIT ORGANISASI TERPILIH/DITENTUKAN	
	19	MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN WBK/WBBM TERHADAP UNIT ORGANISASI TERPILIH/ DITENTUKAN	
	20	MELAKUKAN SOSIALISASI SECARA BERKELANJUTAN ATAS PENANGANAN GRATIFIKASI;	
	21	MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN GRATIFIKASI	
	22	SELURUH FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL TERFOKUS PADA CLIENT DAN AUDIT BERBASIS RESIKO.	

**MATRIKS HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016
UNTUK DITINDAKLANJUTI DI TAHUN 2017**

TIM POKJA		LANGKAH-LANGKAH	RENCANA AKSI
BIDANG MANAJEMEN PERUBAHAN, AKUNTABILITAS KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	1	MELAKUKAN MONITORING, EVALUASI DAN TINDAKLANJUT ATAS HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RB	<ul style="list-style-type: none"> • SETIAP KEGIATAN/AKTIFITAS HARUS DIDUKUNG DENGAN BUKTI/DOKUMEN TERTULIS. • KEGIATAN SOSIALISASI HARUS DILENGKAPI DENGAN BUKTI EVALUASI TENTANG TINGKAT PEMAHAMAN PESERTA SOSIALISASI TERHADAP MATERI SOSIALISASI • PELAKSANAAN KEGIATAN TERTENTU BERKOORDINASI DENGAN TIM SEKRETARIAT RB/TIM (RB POKJA BIDAN ORGANISASI, TATALAKSANA DAN PELAYANAN PUBLIK)
	2	MELAKUKAN SOSIALISASI DAN INTERNALISASI ROAD MAP RB KEPADA PEGAWAI	
	3	MELAKUKAN PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN PMPRB DENGAN BAIK	
	4	MENGKOMUNIKASIKAN AKTIVITAS PMPRB PADA MASING-MASING UNIT ORGANISASI	
	5	MEMBENTUK/MENERBITKAN MEDIA KOMUNIKASI RB SECARA ELEKTRONIK ATAU MANUAL YANG DAPAT MENJANGKAU SELURUH PEGAWAI	
	6	MENERAPKAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA BERBASIS ELEKTRONIK	
	7	MEMBUAT SISTEM PENGUKURAN KINERJA YANG DAPAT DIAKSES SELURUH UNIT ORGASASI	
	8	MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA KINERJA SETIAP BULANAN DAN TRIWULAN	
	9	CASCADING INDIKATOR KINERJA UTAMA DARI ES I SAMPAI DENGAN JFU YANG DITUANGKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA (PK);	
	10	MELAKUKAN SOSIALIASI PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN (<i>AGENT OF CHANGE</i>)	
	11	MELAKUKAN MONITORING TERHADAP PELAKSANAAN AGEN PERUBAHAN(<i>AGENT OF CHANGE</i>).	

TERIMA KASIH



*BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI*

**MATRIKS HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016
UNTUK DITINDAKLANJUTI DI TAHUN 2017**

TIM POKJA		LANGKAH-LANGKAH	RENCANA AKSI
BIDANG PENATAAN ORGANISASI, TATALAKSANA DAN PELAYANAN PUBLIK	1	MELAKUKAN PEMETAAN TERHADAP DUPLIKASI TUGAS FUNGSI ORGANISASI;	<ul style="list-style-type: none"> • SETIAP KEGIATAN/AKTIFITAS HARUS DIDUKUNG DENGAN BUKTI/DOKUMEN TERTULIS. • KEGIATAN SOSIALISASI HARUS DILENGKAPI DENGAN BUKTI EVALUASI TENTANG TINGKAT PEMAHAMAN PESERTA SOSIALISASI TERHADAP MATERI SOSIALISASI
	2	MENYUSUN JABATAN FUNGSIONAL SESUAI KEBUTUHAN ORGANISASI;	
	3	MENYUSUN PETA PROSES BISNIS SESUAI TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI	
	4	MENYUSUN PETA PROSES BISNIS DALAM BENTUK SOP	
	5	MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN SOP SECARA BERKALA	
	6	MENINDAKLANJUTI EVALUASI TERHADAP EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS SOP	
	7	MELAKUKAN SOSIALISASI/ PELATIHAN PENERAPAN BUDAYA KERJA	



LANJUTAN

TIM POKJA		LANGKAH-LANGKAH	RENCANA AKSI
BIDANG PENATAAN ORGANISASI, TATALAKSANA DAN PELAYANAN PUBLIK	8	MELAKUKAN MONITORING SECARA BERKALA TERHADAP PELAKSANAAN BUDAYA KERJA	<ul style="list-style-type: none">• SETIAP KEGIATAN/AKTIFITAS HARUS DIDUKUNG DENGAN BUKTI/DOKUMEN TERTULIS.• KEGIATAN SOSIALISASI HARUS DILENGKAPI DENGAN BUKTI EVALUASI TENTANG TINGKAT PEMAHAMAN PESERTA SOSIALISASI TERHADAP MATERI SOSIALISASI
	9	MENYUSUN SISTEM SANKSI/REWARD BAGI PELAKSANAAN LAYANAN	
	10	MEMBERIKAN SANKSI KPD PELAKSANA LAYANAN YANG TIDAK SESUAI STANDAR	
	11	MEMBUAT MEDIA LAYANAN DLM RANGKA MEMUDAHKAN MASYARAKAT MENGAKSES LAYANAN	
	12	MELAKUKAN SURVEI SEACARA BERKALA THD TAMU/PELANGGAN ATAS KUALITAS LAYANAN	
	13	LAYANANMELAKUKAN TINDAKLANJUT ATAS SELURUH HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	

TERIMA KASIH



*BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI*